

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya kenaikan BBM dipertengahan tahun 2000 lalu hingga kini (awal tahun 2007) berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang disebabkan karena berbagai kebijaksanaan pemerintah dibidang perpajakan yang telah dikeluarkan harus disesuaikan lagi dengan keadaan sekarang. Kenaikan harga minyak bumi akhir-akhir ini telah menghantui dunia, terutama pada sektor rumah tangga di Indonesia. Karena jika sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor minyak, sekarang sudah menjadi pengimpor minyak. BBM sejak dulu dianggap sebagai bahan pokok dan sumber energi strategis bagi penggerak roda perekonomian nasional. Hal ini berpengaruh terhadap berbagai sektor industri, sehingga dikhawatirkan akan menaikkan biaya-biaya produksi berbagai barang kebutuhan pokok maupun jasa. Ini sekaligus membenarkan bahwa kenaikan harga BBM dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Pada masa sekarang ini, Indonesia mencoba menggali sumber dana dari dalam negeri, seperti yang dinyatakan dalam GBHN dan berusaha tidak tergantung pada bantuan luar negeri baik dalam bentuk hibah/hadiah ataupun pinjaman. Sumber dana dalam negeri bisa diperoleh dari kesadaran wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak atau dana dari pemerintah sendiri karena pada saat pemerintah mengalami masa sulit seperti

sekarang ini. Justru pembayaran pajak sangat diperlukan supaya rencana penerimaan tercapai. Sumber dana pemerintah tersebut menurut Suparmoko (1991) antara lain didapat dari: Pajak, Restribusi, Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, Denda-denda dan perampasan yang dijalankan oleh pemerintah, Sumbangan masyarakat, Perolehan uang kertas, Hadiah undian negara, Pinjaman, Hadiah.

Salah satu jenis penerimaan negara dari sektor pajak tersebut adalah pajak penghasilan (PPh). Obyek pajak penghasilan adalah Penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis seseorang atau badan usaha yang diterima wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri. Pajak penghasilan tersebut ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final. Bersifat final artinya setelah penghasilan di pungut pajak penghasilannya oleh pemberi kerja, baik penghasilan maupun pajak yang telah di pungut tidak lagi di perhitungkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) namun tetap harus dilaporkan. Penghasilan yang bersifat final tersebut dasar hukumnya ada dalam UU No. 16 tahun 2000 yang meliputi PPh pasal 28 ayat (9), UU No. 17 tahun 2000 yang meliputi PPh pasal 25 ayat (9), PPh pasal 26 ayat (5) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran.

Pajak penghasilan yang bersifat final meliputi :

1. PPh pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari pengalihan hak dan persewaan atas tanah dan/atau bangunan.

2. PPh pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham di bursa efek dan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
3. PPh pasal 4 ayat (2) hadiah undian, bunga/diskonto obligasi, usaha jasa konstruksi, deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
4. PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri, pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dan wajib pajak yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
5. PPh pasal 21 yaitu uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon yang diterima pegawai atau mantan pegawai dan penghasilan yang diterima honorarium yang dananya dari keuangan negara/daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI kecuali Gol II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan pangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
6. PPh pasal 22 atas penyerahan rokok produksi dalam negeri dan penjualan hasil produksi Pertamina dan badan lain yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premium X dan gas.
7. PPh pasal 23 atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi.
8. PPh pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, hadiah atau imbalan, pensiunan dan pembayaran berkala lainnya, premi asuransi, dan penghasilan BUT kecuali ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh pasal tersebut diatas juga merupakan penerimaan negara yang potensial bagi kehidupan ekonomi masyarakat, karena dana yang terkumpul dijadikan sumber dana bagi penyediaan fasilitas umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nasional supaya tercipta masyarakat yang adil

dan makmur. Mengingat perlunya kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita dengan memperhatikan kondisi diatas maka dilakukan penyempurnaan sistem perpajakan. Salah satunya adalah self assessment sistem yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar.

Alasan menggunakan obyek penelitian pada KPP karena KPP merupakan unsur pelaksanaan Dirjen Pajak yang berada di tingkat daerah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas perpajakan yang meliputi pembinaan penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi dalam menghimpun dana bagi pembiayaan negara dan pembangunan serta meningkatkan dan memperluas kesadaran perpajakan di masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Untuk mengetahui seberapa besar PPh final dengan menentukan target penerimaan PPh tersebut pada KPP Banyuwangi sehingga dapat diketahui peningkatan dan penurunan PPh final melalui perbandingan antara penerimaan PPh final sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Untuk mengkaji lebih lanjut, penulis mengadakan penelitian tentang penerimaan PPh final yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPh FINAL) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI TAHUN 2003-2006”

B. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya untuk mengetahui penerimaan PPh final tahun 2003-2006 maka penulis ingin membandingkan jumlah penerimaan PPh final sebelum dan sesudah kenaikan BBM khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. Untuk itu masalah yang akan dibahas yaitu: “Apakah ada perbedaan antara penerimaan PPh final sebelum dan sesudah kenaikan BBM pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi”.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian supaya data yang akan dianalisis lebih terarah pada pokok permasalahan. Penelitian yang akan dilakukan meliputi penerimaan PPh badan yang bersifat final sebelum dan sesudah kenaikan BBM yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah mengetahui :

1. Obyek-obyek yang dapat dikenakan PPh final pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.
2. Perbedaan PPh final sebelum dan sesudah kenaikan BBM yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi tahun 2003-2006.

3. Penyusunan penelitian ini juga dilaporkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata-I di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sementara itu manfaat dari hasil penelitian itu adalah untuk menambah dan memperoleh gambaran nyata antara teori perkuliahan dengan realita tentang seluk beluk pajak penghasilan final yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi sekaligus dapat dijadikan sumber acuan atau sebagai pembanding penulisan/penelitian sejenis bagi pembaca dan peneliti lain.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran ini skripsi, penulis membuat kerangka/susunan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi beberapa sub-sub, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, dan Sistematika Penyajian Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas uraian teoritis mengenai dasar-dasar pengertian yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian pajak, pengertian penghasilan, fungsi pajak, perlawanan terhadap pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, subyek dan subyek pajak, obyek dan bukan obyek pajak, sarana administrasi

perpajakan, pengertian PPh final dan dasar hukumnya, peneliti terdahulu, hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan data dan sumber data serta metode analisis statistik yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai wilayah kerja dan, struktur organisasi, batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh, pengolahan PPh final pada KPP Banyuwangi, pengumpulan data dan analisis data, indikator dan penyebab masalah , uji normalitas data, hasil analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang disampaikan sebagai masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.